

LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI III DPR RI DENGAN
KEPALA BNPT, KETUA LPSK DAN KETUA KOMNAS HAM

(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang : 2019 - 2020
Masa Persidangan : IV
Rapat ke : III (tiga)
Sifat : Terbuka
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Acara Rapat : Membahas RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2021
Hari / tanggal : Hari Selasa/ 23 Juni 2020
Waktu : Pukul 10.00 - 16.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Ketua Rapat : Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M. / Wakil Ketua Komisi III DPR RI
Sekretaris : Novianti, S.E. / Kepala Bagian Sekretariat Komisi III DPR RI
Hadir : 1. 5 (lima) orang Pimpinan Komisi III DPR RI
2. 37 (dua puluh sembilan) Anggota dari 53 (lima puluh tiga) Anggota Komisi III DPR RI
3. Kepala BNPT beserta jajaran
4. Ketua LPSK beserta jajaran
5. Ketua Komnas HAM beserta jajaran

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Kepala BNPT, Ketua LPSK dan Ketua Komnas HAM dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pukul 10.00 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M. dengan agenda rapat membahas:

- Membahas RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2021
- Tanya – Jawab
- Kesimpulan/Penutup

II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN

1. Beberapa hal yang disampaikan oleh Kepala BNPT diantaranya adalah sebagai berikut:

- Realisasi anggaran Tahun 2019
 - Berdasarkan DIPA Tahun 2019 dengan nomor: SP DIPA-113.01.1.679279/2019 tanggal 11 Desember 2018, jumlah anggaran BNPT Tahun 2019 sebesar Rp699.598.337.000,00. Pada bulan November 2019, BNPT mendapatkan penambahan anggaran untuk Belanja Pegawai sebesar Rp6.618.835.000,00

sehingga jumlah total anggaran BNPT pada tahun 2019 adalah sebesar Rp706.217.172.000,00.

- Realisasi anggaran BNPT tahun 2019 berdasarkan Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) BNPT tahun anggaran 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp648.725.271.326,00 (91,86%) dari total pagu anggaran sebesar Rp706.217.172.000,00
- Alokasi anggaran Tahun 2020
 - Berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-113.01.1.679279/2020 tanggal 12 November 2019 Alokasi anggaran BNPT TA 2020 sebesar Rp516.942.029.000,00. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 5 Kegiatan Penanggulangan Terorisme BNPT, sebagai berikut:
 1. Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi
 2. Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan
 3. Bidang Kerjasama Internasional
 4. Dukungan Administrasi dan SDM
 5. Pengawasan Internal
 - Refocussing dan Realokasi Anggaran BNPT Tahun 2020 Untuk Penanganan COVID-19.
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) maka BNPT mengalami perubahan postur anggaran yang pagu semula sebesar Rp516.942.029.000,00 mengalami pemotongan sebesar Rp76.123.938.000,00 (14,73%) sehingga anggaran BNPT tahun 2020 menjadi Rp440.818.091.000,00.
- Prioritas nasional Tahun 2020
 - Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020, BNPT termasuk salah satu Kementerian/Lembaga yang memiliki Kegiatan Prioritas Nasional yaitu Bidang Stabilitas Pertahanan dan Keamanan (Prioritas Nasional ke-5).
 - Kegiatan/Output Prioritas Nasional BNPT tahun 2020 adalah Koordinasi Peran Serta Masyarakat dan Pemerintah Dalam Pencegahan Terorisme (Sinergisitas antar K/L dalam Penanggulangan Terorisme).
- Program Kerja 100 Hari Kepala BNPT Tahun 2020
 - Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi pola kerja dan menjadi tantangan kita bersama dalam berkarya dan beraktivitas. Guna menjawab tantangan tersebut, Kepala BNPT mengeluarkan Program Kerja 100 Hari untuk tetap mempertahankan capaian kinerja yang telah ditargetkan, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pembentukan BNPT TV News Channel
 2. Penyempurnaan Roadmap Pusat Analisis dan Pengendalian Krisis
 3. Penanganan Wabah Virus COVID-19 di lingkungan BNPT

4. Peningkatan Kualitas Organisasi dan Tata Kerja BNPT
 5. Percepatan Reformasi Birokrasi
 6. Intensifikasi Kontra Propaganda Melalui Media Mainstream, Online, Medsos dan Internet
 7. Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dengan unsur utama para Ulama
 8. Pertemuan dan Dialog Dengan 100 Tokoh Daerah, Nasional, atau Internasional
 9. Pelayanan Rehabilitasi Korban Terorisme
 10. Penyiapan Deklarasi Kesiapsiagaan Nasional
 11. Penyusunan Peraturan BNPT sebagai Amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019
 12. Penanganan Perempuan dan Anak Yang Berhubungan Dengan Kelompok Terorisme
 13. Counter Terrorist Financing
- Pagu indikatif BNPT Tahun 2021
 - Berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor S-376/MK.02/2020 – B.310/M.PPN/D.8/PP.04.02/05/2020 tanggal 8 Mei 2020 hal Pagu Indikatif Belanja K/L TA 2021 ditetapkan Pagu Indikatif BNPT Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp.515.919.444.000,00 yang terdiri atas:
 1. Belanja Pegawai sebesar Rp38.438.164.000,00
 2. Belanja Barang Operasional sebesar Rp30.045.073.000,00
 3. Belanja Barang Non Operasional sebesar Rp374.792.000.000,00
 4. Belanja Modal sebesar Rp72.644.207.000,00
 - Berdasarkan Surat bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan nomor: S-375/MK.02.2020 dan B.308/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tanggal 8 Mei 2020 perihal Daftar Program Kementerian/Lembaga TA 2021, maka Program BNPT yang semula hanya 1 yaitu Program Penanggulangan Terorisme menjadi 2 yaitu:
 1. Program Penanggulangan Terorisme; dan
 2. Program Dukungan Manajemen.
 - Usulan tambahan anggaran Tahun 2021
 - Untuk dapat mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan, BNPT telah mengajukan usulan tambahan anggaran tahun 2021 kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui surat Kepala BNPT nomor: PR.02.01/66/2020 tanggal 13 Maret 2020 perihal Usulan Inisiatif Baru Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp361.602.246.000,00 kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI.

2. Beberapa hal yang disampaikan oleh Kepala LPSK diantaranya adalah sebagai berikut:

- Capaian kinerja LPSK 2019
 - Capaian kinerja LPSK 2019 sebesar 94,69% dengan sasaran strategis yaitu:
 1. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban oleh LPSK
 2. Terwujudnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang efektif dan efisien
- Realisasi anggaran LPSK 2017-2019

Tahun Anggaran	Alokasi Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
2017	74.589.002.000	73.252.228.549	98,21
2018	81.411.655.000	80.692.881.180	99,12
2019	76.604.393.000	76.413.446.974	99,75

- Kondisi aktual 2020
 - Anggaran terbatas, LPSK melakukan upaya efisiensi, antara lain melakukan penghentian program perlindungan, dan diproyeksikan keterbatasan anggaran akan mempengaruhi layanan s.d. Desember 2020.
 - Jumlah Terlindung hingga 15 Juni 2020 sebanyak 1.423 Terlindung dengan total layanan sebanyak 2.495.
 - LPSK terus menerapkan kebijakan pengurangan jumlah Terlindung untuk menyesuaikan dengan kemampuan anggaran.
 - Kebutuhan anggaran untuk pembayaran kompensasi korban terorisme sebesar Rp.5.646.627.520,-.
 - LPSK telah mengajukan usulan tambahan anggaran kepada Kementerian Keuangan melalui Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp.127 Milyar.
- Pagu indikatif LPSK tahun 2021
 - Berdasarkan Surat Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Nomor B-7/Kemensetneg/Ses/PR.00.02/05/2020 perihal Pagu Indikatif Bagian Anggaran 007 Tahun Anggaran 2021, LPSK mendapatkan Pagu Indikatif tahun 2021 sebesar Rp.79.417.515.000 dari usulan
- Usulan new inisiatif 2021
 - Pelaksanaan Layanan asesment / penilaian derajat luka korban tindak pidana terorisme masa lalu sebesar Rp.1.150.000.000,-
 - Pelaksanaan pemberian kompensasi korban Tindak Pidana Terorisme Masa lalu sebesar Rp.44.150.000.000,-.
 - Kebutuhan investigasi dan asesmen bagi Korban Terorisme di Luar Negeri sebesar Rp.1.500.000.000
 - Penguatan Layanan bantuan Medis dan Psikologis korban kejahatan sebesar Rp.12.350.000.000,-.
 - Pelaksanaan fasilitasi kompensasi kepada korban tindak pidana terorisme sebesar Rp.2.240.000.000,-.

- Pelaksanaan layanan pemenuhan hak prosedural sebesar Rp.4.150.000.000,-
- Peningkatan layanan bantuan rehabilitasi psikososial melalui pembentukan sekretariat nasional pemulihan psikososial korban sebesar Rp.1.550.000.000,-
- Peningkatan dan penguatan layanan fasilitasi restitusi sebesar Rp.2.230.000.000
- Sosialisasi Pelaksanaan pemenuhan hak korban terorisme masa lalu sebesar Rp.1.450.000.000,-
- Penguatan Kerjasama Internasional sebesar Rp.1.575.000.000,-
- Pengembangan Perlindungan HUKUM dan penghargaan bagi pelapor Rp. 1.340.000.000
- Penguatan kelembagaan untuk menjadi Badan Anggaran sendiri dan persiapan pembentukan LPSK Perwakilan di Daerah sebesar Rp.2.544.000.000,-
- Peningkatan kualitas SDM sebesar Rp.2.000.000.000,-
- Pengadaan sarana pendukung sebesar Rp.5.500.000.000,-

3. Beberapa hal yang disampaikan oleh Ketua Komnas HAM diantaranya adalah sebagai berikut:

- Isu strategis Komnas HAM
 - Pelanggaran HAM yang terkait Konflik Agraria
 - Pelanggaran HAM yang Berat
 - Penataan Kelembagaan
 - Intoleransi dan Ekstrimisme dengan Kekerasan
 - Akses atas Keadilan
 - Kekerasan Aparat Negara dan Kelompok Masyarakat
 - Kebebasan Berpendapat, Berekspresi, dan Berserikat
- Pagu Komnas HAM Tahun Anggaran 2020
 - Berdasarkan Surat Edaran Bersama (SEB) Kemenkeu dan Bappenas Nomor: S-338/MK.02/2019 Tanggal 29 April 2019 Perihal Pagu Indikatif Belanja K/L TA 2020 bahwa Pagu Indikatif KOMNAS HAM Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 104.058.932.000,- dengan rincian untuk Komnas HAM sebesar Rp. Rp. 80.252. 286.000,- dan untuk Komnas Perempuan sebesar Rp. Rp. 23.806.646.000,-
- Pagu Komnas HAM Tahun Anggaran 2021
 - Berdasarkan Surat Edaran Bersama (SEB) Kemenkeu dan Bappenas Nomor: S 376/MK.02/2020B.310/M.PPN/D.8/pp.04.02/05/2020 Tanggal 8 Mei 2020 Perihal Pagu Indikatif Belanja K/L TA 2021 bahwa Pagu Indikatif KOMNAS HAM Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 100.090.000.000,- dengan rincian untuk Komnas HAM sebesar Rp. Rp. 80.252. 286.000,- dan untuk Komnas Perempuan sebesar Rp. Rp. 22.739.885.000,-
- Klasifikasi belanja Komnas HAM Tahun Anggaran 2021
 - Program dukungan manajemen Rp. 62.920.770.000 ,-
 - Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM Rp. 37.169.230.000 ,-

- Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021
 - Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara Rp. 5.503.627.000,-
 - Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Rp. 10.066.738.000,-
 - Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban Rp. 22.739.985.000,-
 - Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengawasan dan Kerjasama Rp. 4.085.901.000,-
 - Penyelenggaraan Layanan Perkantoran, Kepegawaian, Keuangan, Per UU dan Bantuan Hukum Rp. 58.834.869.000,-
- Total tambahan kebutuhan anggaran Komnas HAM adalah Rp. 374.676.970.000,-

4. Beberapa hal yang disampaikan oleh Komisioner Komnas Perempuan diantaranya adalah sebagai berikut:

- Arah perubahan Komnas Perempuan 2020-2024
 - Terwujudnya bangunan dan konsensus nasional untuk pembaruan pencegahan KtP, perlindungan perempuan dan pemulihan bagi perempuan korban kekerasan dalam kerangka HAM yang peka gender dan lintas batas dengan kepemimpinan perempuan
- Strategi utama program
 - Harmonisasi kebijakan
 - Pengakuan, perlindungan dan dukungan untuk WHRD
 - Perkuat akses keadilan: SPPT-PKKTP
 - Penguatan layanan pemulihan
 - Penguatan peran KP
 - Percepatan implementasi kebijakan kondusif
 - Perumusan pedoman, standard setting, dan alat money dengan pendekatan uji cermat tuntas
- Isu Prioritas Komnas Perempuan 2020 -2021
 - Kekerasan terhadap Perempuan dalam konflik dan bencana
 - Kekerasan terhadap Perempuan Pekerja
 - Kekerasan terhadap Perempuan Tahanan dan serupa
 - Tahanan, termasuk di panti rehabilitasi untuk disabilitas
 - Kekerasan seksual dalam berbagai konteks terhadap perempuan
 - Penguatan Kelembagaan Komnas Perempuan
- Platform program
 - Pendidikan Publik dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan berbasis gender
 - Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Pengembangan Sistem Pemulihan untuk Pemenuhan Hak Korban
 - Pemantauan dan Pengkajian Kekerasan terhadap Perempuan

- Usulan anggaran
 - Anggaran diusulkan Rp. 27.331.985.000 dengan pagu Indikatif Rp. 22.739.985.000 dan usulan tambahan anggaran Rp. 4.592.000.000
5. Beberapa hal yang disampaikan oleh Anggota diantaranya adalah sebagai berikut:
- Meminta bahan anggaran disampaikan satu hari sebelumnya dan juga melampirkan satuan tiga.
 - Menyampaikan bahwa postur anggaran BNPT harusnya berbeda setelah adanya revisi UU terorisme namun didalam bahan anggaran yang dipaparkan tidak ada perubahan dengan bahan tahun lalu dan BNPT terlihat seperti tidak punya visi.
 - Mempertanyakan 7 program yang belum teralokasi dan program deradikalisasi Agro wisata Ikhwan yang terdengar menyasar suatu agama tertentu.
 - Kebutuhan Komnas HAM yang belum teralokasi tidak mendetail, postur anggaran dari Rp. 104 Miliar tetapi program yang bisa dijalankan hanya Rp. 39 Miliar.
 - Menanyakan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yang mana.
 - LPSK tidak mampu mengelola kewenangan, sehingga tidak ditakuti Lembaga lain dan cenderung diabaikan. Usulan tambahan anggaran tidak boleh lebih besar dari pagu yang diberikan.
 - Mengharapkan agar BNPT dapat melakukan tugas dengan sebaik-baiknya walaupun anggarannya menurun drastis. Meminta agar BNPT dapat melacak akun-akun anonim yang menyebarkan paham radikalisme.
 - Meminta penjelasan lebih detail tentang usulan penambahan anggaran BNPT yang dialokasikan untuk mendukung Gedung pembangunan BNPT dan program deradikalisasi.
 - Tugas BNPT menitikberatkan pada kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi, dan deradikalisasi. Melihat pada output program kegiatan, hanya ada 201 kegiatan deradikalisasi orang yang sudah terpapar paham radikalisme tidak sebanding dengan jumlah riil orang yang terkena radikalisme. BNPT harus fokus dalam penanggulangan dan meminimalisir kegiatan-kegiatan terorisme.
 - Keberadaan Komnas HAM tidak dirasakan oleh masyarakat saat ini, seperti dalam kasus Novel Baswedan dimana pelakunya hanya mendapat pidana 1 tahun penjara, masyarakat mempertanyakan keberadaan Komnas HAM dalam penegakan HAM di Indonesia.
 - Mendukung penguatan LPSK, korban terorisme adalah tanggung jawab negara, agar bisa dimasukkan kedalam program LPSK dan tetap diberikan perlindungan.
 - Melihat pada usulan anggaran BNPT terhadap peningkatan kemampuan dalam melakukan assessment kenapa tidak digabungkan dengan peningkatan operasional BNPT menjadi satu program.
 - Terhadap kebijakan BPJS dan LPSK membutuhkan payung hukum yang jelas agar Tupoksi LPSK menjadi jelas.

- Seperti apa langkah-langkah preventif Kepala BNPT dalam melakukan pencegahan dan bagaimana sosialisasi ditengah masyarakat.
- Terhadap LPSK apakah telah menjalankan tupoksi dengan maksimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Belum mendengar gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh Komnas HAM dalam menangani berbagai permasalahan HAM.
- Membayangkan BNPT yang baru dibawah kepemimpinan Kepala BNPT yang baru. BNPT dan PPATK dapat bekerjasama dalam hal tindak pidana pendanaan terorisme, apakah sudah ada anggaran untuk ini.
- Komnas HAM dan LPSK keberadaannya tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat. Seharusnya kedua Lembaga harus hadir dalam masyarakat, Komnas HAM dalam hal penegakan HAM dan LPSK dalam memberikan perlindungan saksi dan korban.
- Setiap pembahasan anggaran selalu menemui kekurangan anggaran, dari paparan yang disampaikan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu capaian-capaian kinerja terhadap anggaran pada periode sebelumnya. Terhadap BNPT, setuju bahwa terorisme merupakan *transnational crime*, program yang ditawarkan bisa menjadi jawaban bagaimana menanggulangi terorisme dimasa mendatang. Memberikan dukungan agar *mindset* masyarakat dapat berubah terhadap penyebaran paham ekstrimis yang bertentangan dengan ideologi bangsa.
- Peran di Komnas HAM beberapa tahun ini tidak nampak dalam menangani konflik yang ada ditengah masyarakat.
- Terhadap Komnas Perempuan agar *human trafficking* dapat di advokasi, jumlah kekerasan terhadap perempuan di daerah masih sangat tinggi.
- LPSK mendukung menjadi badan anggaran tersendiri agar dapat mengatur anggaran secara mandiri.
- Mengharapkan BNPT lebih baik lagi dibawah Kepemimpinan yang baru. Pada poin 9 terhadap program rehabilitasi korban terorisme, semestinya BNPT hanya sebatas berkoordinasi sebab merupakan wilayahnya LPSK.
- Terhadap Komnas HAM diharapkan mengirimkan berkas-berkas laporan perkembangan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM agar dapat dibawa pada rapat kerja dengan mitra lain yang terkait dan dapat ditindaklanjuti.
- Setuju agar LPSK dapat lebih tegas lagi, banyak orang diperiksa berjam-jam tetapi tidak jelas dan penyidik juga tidak siap. Persoalan LPSK masih berada dibawah Setneg kenapa belum selesai sampai sekarang padahal sudah ada Sekjen LPSK.
- Terhadap Komnas HAM meminta perbaikan pagu, Alokasi Pagu Indikatif TA 2021 sebesar Rp. 100.090.000.000,- terbagi menjadi dua yaitu Rp.80.252.286.000,- untuk Komnas HAM dan Rp. 22.739.985,- untuk Komnas Perempuan namun apabila dijumlahkan besarnya mencapai 102M, tolong diperbaiki.

- Untuk BNPT apakah bisa melakukan cegah dini dan apakah anggaran yang ada tidak cukup tetapi yang dibelanjakan tidak sampai 700M, BNPT harus maksimal dalam menyelamatkan bangsa dan melahirkan inovasi-inovasi.
- Komisi III DPR RI perlu mengambil inisiatif untuk mengkritisi lembaga-lembaga Negara yg beririsan dengan Komisi III DPR RI untuk mengimbangi dan menangkap aspirasi. Keinginan pembentuk UU agar BNPT dapat memetakan daerah-daerah zona hijau, merah, dan hitam serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan Pemerintah Daerah untuk bisa merubah warna-warna dan memperbaharui pemetaan secara berkala.
- Meminta klarifikasi LPSK apakah benar telah menerbitkan surat penghentian pemberian bantuan terhadap korban tindak pidana terorisme.
- Tidak ingin BNPT sibuk dengan kunjungan LN tetapi lebih menggunakan anggaran untuk realisasi program.
- Terhadap Komnas HAM jangan hanya datang untuk meminta anggaran tetapi ketika rapat pengawasan menolak datang ke Komisi III DPR RI serta meminta penjadwalan ulang.

6. Beberapa jawaban hal yang disampaikan oleh Kepala BNPT diantaranya adalah sebagai berikut:

- Terdapat pemahaman keliru yang kerap kali mengatasnamakan agama, oleh sebab itu melalui kanal-kanal publikasi akan mendengungkan secara massif untuk mengurangi paham-paham radikalisme.
- Pada Puldasis akan memaksimalkan teknologi informasi yang memadai, mengenai *counter terrorist financing* BNPT tidak bertindak sebagai penyidik dan melakukan pemberkasan sehingga hanya meminta bantuan PPATK melakukan analisis sebagai bahan dasar.
- Persoalan *buzzer* apabila menyampaikan pesan positif maka dapat membantu dalam menyampaikan pesan ke seluruh lapisan masyarakat.
- Terkait anggaran yang terus bertambah tidak terlepas dari ketentuan Kementerian Keuangan. BNPT sedang mengupayakan pembangunan sinergi lintas profesi, etnik, dan agama sebagai bentuk perluasan pelibatan masyarakat sebagai bentuk kesiapsiagaan nasional.
- Akan meminta seluruh komponen masyarakat berperan dalam memberantas kejahatan terorisme.
- Kerjasama dengan Dirjen PAS sangat erat sekali dimasa penyidikan, penuntutan, menjalankan hukuman, dan setelah keluar, Kerjasama ini terutama pada saat menjadi warga binaan seperti di Lapas Gunung Sindur dan Lapas Nusa Kambangan kemudian akan mengirim tim untuk melakukan *assessment* dan melihat apakah Napiter dapat kooperatif dan dapat dilakukan deradikalisme maka dapat dipindahkan ke Lapas Kantor BNPT di Sentul, untuk mendapat pelatihan dan membangkitkan semangat nasionalisme. Sedangkan terhadap Napiter yang tidak lolos *assessment* maka tidak akan di pindahkan. BNPT juga bekerjasama dengan Kominfo dalam mencermati media sosial yang

berkembang di masyarakat dan menindaklanjuti keberadaan konten-konten yang menyimpang dan dapat mengancam negara.

- Berkaitan dengan anggaran BNPT untuk deradikalisasi memang belum maksimal, untuk melakukan pengawasan program deradikalisasi bagi narapidana setelah menjalani masa hukuman terus diupayakan. Akan melengkapi *data centre* untuk mendorong Puldasis.
- Terhadap kesiapsiagaan nasional termasuk salah satu sarana cegah dini yang juga melibatkan K/L dengan melibatkan teknologi dan informasi. Di jajaran daerah ada unsur Kepolisian, TNI, Pemda juga memiliki tim intelejensi daerah yang dapat mendukung cegah dini.
- Menyampaikan terimakasih atas kesempatan yang diberikan dan terbuka apabila Komisi III DPR RI berkenan mengunjungi kantor BNPT di Sentul.

7. Beberapa jawaban hal yang disampaikan oleh Kepala LPSK diantaranya adalah sebagai berikut:

- Menyampaikan bahwa satuan tiga anggaran 2021 belum ada dan telah mengirimkan satuan tiga TA 2020 ke Komisi III DPR RI. Kompensasi dimasukkan kedalam anggaran tambahan bukan anggaran pokok sebab Kementerian Keuangan menilai belum ada dasar hukum terkait pemberian kompensasi terhadap korban terorisme, PP No 7 yang sampai saat ini belum di tandatangani oleh Presiden.
- Beberapa isu termasuk pelanggaran HAM masa lalu sudah disampaikan dengan merujuk pada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM. LPSK juga banyak menangani kasus TPPO, kasus ABK kapal Cina yang dibuang kelaut sudah menerima permohonan mereka sebagai terlindung, kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan, kasus-kasus terorisme, kasus korupsi sepakat perlindungan terhadap saksi-saksi tipikor merujuk pada keputusan KPK, kasus Novel sudah secara proaktif menawarkan perlindungan terhadap ybs dan keluarganya, sedang menyiapkan Perpres terhadap perlindungan JC.
- Kesepakatan dengan Setneg adalah dilakukan pada awal Semester II sudah bisa menjadi Badan Anggaran tersendiri sehingga lebih leluasa dalam mengusulkan anggaran ke Komisi III DPR RI. LPSK yang sedang berproses menjadi badan anggaran tersendiri dan menjadi mitra Komisi III DPR RI sepenuhnya dan meminta dukungan agar hal tersebut dapat segera terlaksana.
- LPSK tidak pernah mengirimkan surat kepada korban tindak pidana terorisme terkait penghentian pemberian bantuan dan akan menyelidiki hal ini. LPSK hanya menjalankan perintah UU untuk memberikan bantuan sesaat setelah terjadinya tindak pidana terorisme tanpa membedakan siapa korbannya pejabat negara atau masyarakat.

8. Beberapa jawaban hal yang disampaikan oleh Ketua Komnas HAM diantaranya adalah sebagai berikut:

- Memperbaiki anggaran Komnas HAM hingga mendapatkan opini WTP bukan hal mudah.

- Ingin memperbaiki MoU dengan aparat penegak hukum agar tidak hanya bersifat umum.
- Tidak menutup diri untuk kritik yang membangun dalam rangka meningkatkan kompetensi Komnas HAM.
- Terdapat penginputan data yang salah terkait pembagian alokasi anggaran Komnas HAM dan Komnas Perempuan dari alokasi pagu anggaran 100M dan meminta maaf atas kesalahan data yang ditampilkan.
- Mengapresiasi dukungan yang diberikan dan sangat berarti. Persoalan kekerasan terhadap perempuan kompleks dan meminta dukungan agar tata kelola negara dan penguatan lembaga. Kedepan diharapkan lembaga perempuan dapat independen. Menyadari masih banyak hal yang harus diperbaiki, selanjutnya akan datang dengan tim yang lebih lengkap. Menyampaikan terimakasih atas berbagai masukan dan kritik untuk membangun Komnas HAM.

III. CATATAN

Komisi III DPR RI telah mendengarkan penjelasan dari :

1. Kepala BNPT atas Pagu Indikatif tahun 2021 yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp. 515.919.444.000,- beserta usulan tambahan yang diajukan sebesar Rp. 361.602.246.000,- sehingga menjadi Rp. 877.521.690.000,-
2. Ketua Komnas HAM atas Pagu Indikatif tahun 2021 yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp. 100.090.000.000,- beserta usulan tambahan yang diajukan sebesar Rp.361.462.820.000,- untuk Komnas HAM dan Rp. 4.592.000.000,- untuk Komnas Perempuan sehingga menjadi Rp. 466.284.246.000,-.
3. Ketua LPSK atas Pagu Indikatif tahun 2021 yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp. 79.417.515.000,- beserta usulan tambahan yang diajukan sebesar Rp. 83.729.000.000,- sehingga menjadi Rp. 163.146.515.000,-

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.00 WIB

**PIMPINAN KOMISI III DPR RI
WAKIL KETUA,**

**IR. PANGERAN KHAIRUL SALEH, M.M.
A-514**